BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

a. Sekilas Sejarah Bandara Husein Sastranegara Bandung

- Pada awalnya lapangan terbang Husein Sastranegara merupakan lapangan terbang peninggalan Pemerintah Hindia Belanda (sebelum PD II) dengan sebutan Lapangan Terbang Andir yaitu suatu nama lokasi / daerah dimana lapangan terbang tersebut berada.
- Nama Husein Sastranegara diambil dari nama seorang penerbang militer (TNI AU) yang telah gugur pada saat latihan terbang di Yogjakarta tanggal 26 September 1946.
- Pada masa penjajahan Jepang daerah tersebut dijadikan basis Angkatan Udara Kekaisaran Jepang.
- Sejak kemerdekaan RI, sesuai dengan peraturan yang berlaku, daerah tersebut diserahkan pengelolaannya kepada TNI AU dengan status Lapangan Terbang Militer dengan sebutan Pangkalan Udara Utama Husein Sastranegara Bandung.
- Sekitar tahun 1955 walaupun merupakan Pangkalan TNI AU, sudah pernah dilakukan kegiatan penerbangan sipil secara tidak terjadwal oleh perusahaan GIA namun tidak dapat berlangsung lama (terhenti) karena adanya kendala yaitu fasilitas keselamatan

penerbangan yang dipersyaratkan oleh Anex (Anex 1 s/d Anex 18), IATA dan ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Dunia) karena tidak sesuai dengan aturan dimaksud terutama pada saat kondisi cuaca buruk yang justru mutlak diperlukan oleh suatu Lapangan Terbang. Bandung mempunyai topografis yang kurang menguntungkan bagi adanya suatu lapangan terbang.

- Pada tahun 1974 mulai dilakukan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan udara komersial secara resmi yaitu dengan berdirinya kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan nama Stasiun Udara Husein Sastranegara Bandung untuk kepentingan kegiatan penerbangan komersial sipil.
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna akan jasa angkutan udara, maka beberapa pangkalan udara termasuk Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung ditetapkan sebagai "Enclave Civil" yaitu suatu daerah terbatas yang berada di sebuah pangkalan udara militer, di mana berlaku peraturan sipil serta menyelenggarakan pelayanan lalu lintas udara tersebut dilakukan / dikelola oleh sipil (bukan militer).
- Pada tanggal 21 Agustus 1975 ditetapkan suatu kesepakatan tentang Dasar - Dasar Penggunaan Bersama Pangkalan / Pelabuhan Udara melalui SKB Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri

Keuangan. Dengan SKB Nomor Kep/30/IX/1975, Nomor : KM 393/S/PHB-1975, Nomor Kep 927A/MK/IV/8/1975

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 50/OT.002/ PHB 1978 Kantor Perwakilan Ditjen Perhubungan Udara tersebut menjadi Pelabuhan Udara Husein Sastranegara Bandung sebagai unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Ditjen Perhubungan Udara dengan Klasifikasi Pelabuhan Udara Kelas III.
- Selanjutnya pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68/HK.207/PHB-83 tanggal 19 Februari 1983 klasifikasi Pelabuhan Udara ditingkatkan dari kelas III menjadi kelas II.
- Pada tahun 1994 dilaksanakan pengalihan pengelolaan Bandar Udara dari Dephub kepada PT. AP II sesuai PP RI Nomor 26 Thn 1994 tanggal 30 Agustus 1994 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara RI ke dalam Modal saham PT. AP II.

b. Sejarah Singkat Berdirinya PT. (Persero) Angkasa Pura II

- Tanggal 13 agustus 1984 berdasarkan PP Nomor 20 tahun 1984 berdirinya Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.
- Tanggal 02 Januari 1985 Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng berdasarkan Km Perhubungan No.KM 6/OT 002/Phb 85.

- Tanggal 16-31 Maret 1985 Pemindahan Operasi Penerbangan Berjadwal dari bandara Kemayoran dan Halim Perdana Kusumah ke Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.
- Tanggal 01 April 1985 Pengoperasian secara penuh Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng dan pengalihan managemen Bandara Halim P dari perum Angkasa Pura ke Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.
- Tanggal 03 Juli 1985 Penggantian nama Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta, berdasarkan Keputusan Presiden No 54 / 1985.
- Tanggal 19 Mei 1986 Perubahan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Perum Angkasa Pura II berdasarkan PP No 26/1986.
- Tanggal 14 Maret 1987 Penetapan kembali Organisasi tata Kerja Perum Angkasa Pura II berdasarkan KM Perhubungan No SK 21/OT.001/Phb-87.
- Tanggal 19 Februari 1991 Penambahan Penyertaan Modal negara di Bandara Halim P ke dalam modal Perum AP II berdasarkan PP No 07/1992.
- Tahun 1991 PP Nomor 10 tahun 1991 Tentang Tambahan Pengelolaan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Sipadio Pontianak.

- Tanggal 17 Maret 1992 PP Nomor 14 tahun 1992 Tentang Perubahan Status Hukum dari Perum menjadi Persero.
- Tanggal 02 Januari 1993 Pendirian PT (Persero) AP II berdasarkan Akte Notaris Muhani Salim SH Nomor 03 tanggal 02 Januari 1993.
- Tanggal 22 Januari 1994 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5.33/MK/94 tentang Tambahan Pengelolaan Bandara Polonia Medan.
- Tanggal 09 April 1994 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5.33/MK016/94 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor A 270/AU.001/SKJ/94 Tentang Tambahan Pengelolaan Bandara Sultan Syarif Kasim-Palembang II-Pekanbaru, Tabing-Padang, Sultan Iskandar Muda Aceh dan Bandara Husein Sastranegara Bandung.
- Tahun 2000 KM....tentang Tambahan Pengelolaan Bandara Kijang Tanjung Pinang.

VISI, MISI, FALSAFAH DAN TUJUAN PERUSAHAAN
PT. (PERSERO) ANGKASA PURA II

VISI PERUSAHAAN :

" Menjadi Pengelola Bandar Udara bertaraf Internasional yang mampu bersaing di kawasan Regional."

MISI PERUSAHAAN :

" Mengelola Jasa Kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan dalam upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis."

FALSAFAH PERUSAHAAN yaitu " PEDULI"

P = Pelayanan Prima
E = Efektifitas dan Effesiensi
D = Dedikasi Tinggi
U = Unggul
L = Lingkungan
I = Internasional

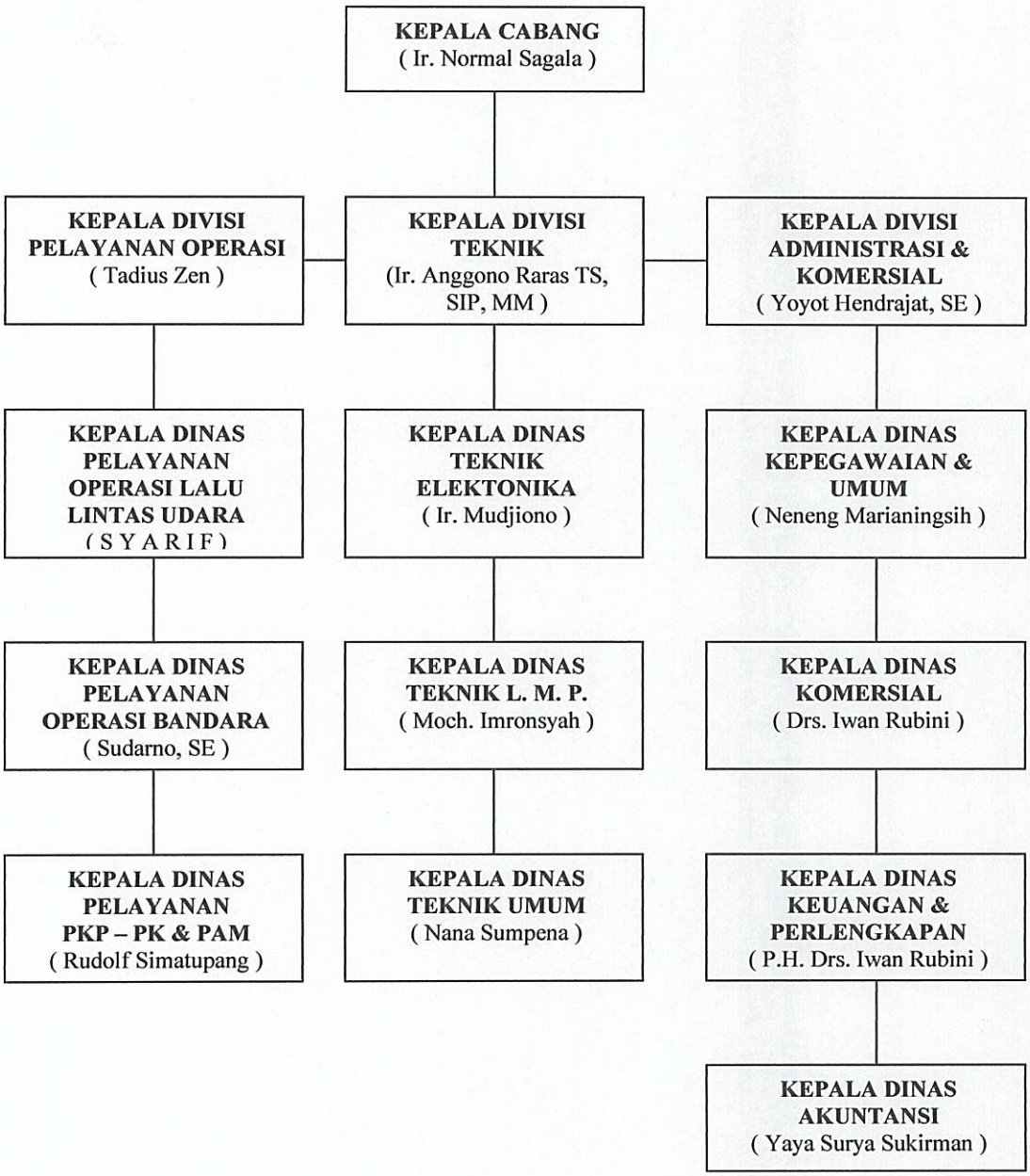
Dengan **" Pelayanan Prima, Effektif dan Effesien berdedikasi Tinggi, Unggul dalam Lingkungan Internasional "**

TUJUAN PERUSAHAAN :

a. Melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan Program Pemerintah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
b. Memupuk keuntungan bagi Perseroan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas – luasnya serta melakukan usaha – usaha lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG
PT. (Persero) ANGKASA PURA II
BANDAR UDARA HUSEIN SASTRANEGARA – BANDUNG



2.3 Uraian Tugas Perusahaan PT. (Persero) Angkasa Pura II

Uraian tugas dan fungsi Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung :

I. KEPALA CABANG

1) Bertugas menyelenggarakan kesiapan sarana, prasarana, pengendalian jasa kebandarudaraan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direksi.
2) Bertugas dan berfungsi menyelenggarakan pengelolaan pengusahaan pelayanan dan kebijaksanaan Direksi.
3) Menyelenggarakan pengendalian kegiatan administrasi sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan Direksi.
4) Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia yang tersedia.
5) Melaksanakan tugas – tugas lain di luar tugas pokok yang sudah digariskan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi.
6) Menyelenggarakan penyediaan, pengelolaan kegiatan usaha lain yang berhubungan dengan jasa kebandarudaraan.

II. DIVISI PELAYANAN OPERASI

1) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan operasi lalu lintas udara, kegiatan pelayanan operasi bandara, kegiatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta kegiatan pengamanan Bandar udara.

2) Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada unit kerja lingkungan Divisi Pelayanan Operasi.
3) Melaksanakan pembinaan peningkatan profesionalisme dan karier sumber daya manusia, tata kerja (prosedur) operasional dalam menjalankan tugas pelayanan operasi lau lintas udara, pelayanan operasi bandara, kegiatan PKPPK dan pengamanan.
4) Melaksanakan koordinasi dengan divisi lain, untuk kelancaran tugas baik secara operasional maupun administrasi kebandarudaraan.

III. KEPALA DIVISI TEKNIK

1) Merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan semua fasilitas teknik elektonika, fasilitas teknik listrik, mekanikal dan peralatan serta fasilitas teknik umum.
2) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas elektronika, teknik listrik mekanikal, peralatan dan fasilitas teknik umum.
3) Menyiapkan dan melaksanakan perbaikan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana Bandar udara untuk tercapainya penyelenggaraan operasional.
4) Menyiapkan dan melaksanakan sarana dan prasarana Bandar udara untuk pengendalian dan pengawasan sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.
5) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan divisi teknik.

6) Dilaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kacab.
7) Melakukan koordinasi dengan Lanud Husein Sastranegara dan PT. DI serta unit lain di luar PT. AP II.

IV. KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DAN KOMERSIAL

1) Merencanakan, menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha komersial.
2) Menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
3) Menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan akuntansi.
4) Merencanakan dan menyiapkan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan umum.
5) Merencanakan dan melaksanakan usaha pembinaan, peningkatan dan pengembangan SDM secara umum di Kantor Cabang.
6) Melaksanakan koordinasi – kordinasi dengan pejabat – pejabat lain baik intern maupun ekstern.
7) Melaksanakan tugas – tugas pokok sesuai dengan perintah atasan.
8) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

IV a. STAFF JUNIOR ADMINISTRASI DAN KOMERSIAL

1) Melaksanakan / membantu Kepala Divisi dalam menyelesaikan tugas – tugas pada dinas terkait.
2) Melaksanakan evaluasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas atau staf pelaksana dalam rangka penyusunan konsep surat / penyelesaian surat

termasuk perjanjian dan ikatan kerja serta penyelesaian tugasyang harus diselesaikan dengan segera atas perintah atasan.

3) Melaksanakan koordinasi dengan Divisi lain atau dinas terkait sehubungan dengan penyelesaian masalahtertentu atas perintah atasan.
4) Mengkoordinasikan pembuatan laporan – laporan yang terkait dengan tugas Divisi Administrasi dan Komersial.
5) Melaksanakan tugas – tugas lain diluar tugas pokok sesuai dengan perintah atasan dan bertanggung jawab kepada Kadiv Administrasi dan Komersial.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Ruang lingkup usaha PT. (Persero) Angkasa Pura II secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara.
2) Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, cargo dan pos.
3) Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah.
4) Jasa pelayanan penerbangan.
5) Jasa penunjang kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan.

6) Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan serta industri dan gedung / bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
7) Jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan.
8) Usaha – usaha lain yang berkaitan dengan jasa kebandarudaraan yang dapat menunjang tujuan perusahaan.